DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i
Daftar Tabel..... ii
Daftar Lampiran..... iii

BAB I : PENDAHULUAN..... I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Tujuan..... I-3
1.3 Dasar Penyusunan..... I-3

BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH..... II-1

BAB III : PRIORITAS BELANJA DAERAH..... III-1

BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN..... IV-1
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan..... IV-1
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan..... IV-5
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga..... IV-5

BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..... V-1

BAB VI : PENUTUP..... VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2020..... II-1

Tabel 3.1.
Penjelasan Program Pembangunan
Daerah Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo..... III-3

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Urusan Pemerintahan..... IV-1

Tabel 4.2.
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program
dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020..... IV-5

Tabel 4.3.
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja
Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020..... IV-6

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020..... V-1

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..... IV.2.1

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan..... IV.2.8

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Rumah Sakit Umum Daerah..... IV.2.35

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Sumber Daya Air..... IV.2.38

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta karya
dan Tata Ruang..... IV.2.41

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja..... III.2.45

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Sosial..... IV.2.47

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Tenaga Kerja..... IV.2.50

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana..... IV.2.53

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Pangan dan Pertanian..... IV.2.56

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan..... IV.2.61

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... IV.2.66

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... IV.2.69

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan..... IV.2.72

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika..... IV.2.75

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro..... IV.2.78

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu..... IV.2.81

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan

Pariwisata..... IV.2.84

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... IV.2.87

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Perikanan..... IV.2.90

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan..... IV.2.93

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Inspektorat..... IV.2.94

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..... IV.2.98

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah..... IV.2.104

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Badan Pelayanan Pajak Daerah..... IV.2.107

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Badan Kepegawaian Daerah..... IV.2.110

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah..... IV.2.112

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah..... IV.2.115

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Sekretariat DPRD..... IV.2.120

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... IV.2.123

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Sidoarjo..... IV.2.125

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Candi..... IV.2.131

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Buduran..... IV.2.134

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Wonoayu..... IV.2.137

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Krian..... IV.2.140

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Porong..... IV.2.146

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Krembung..... IV.2.151

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Jabon..... IV.2.154

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Balongbendo..... IV.2.157

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Tarik..... IV.2.160

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Taman..... IV.2.163

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Waru..... IV.2.168

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Gedangan..... IV.2.172

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Sedati..... IV.2.176

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Tanggulangin..... IV.2.179

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Tulangan..... IV.2.184

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Prambon..... IV.2.185

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Sukodono..... IV.2.188

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyusunan anggaran merupakan hasil dari sebuah proses perencanaan yang bertahap dari penetapan kebijakan pemerintah yang diturunkan hingga teknis kegiatan di masing-masing unit kerja pada organisasi. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah yang terdiri dari berbagai aspek diantaranya adalah ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya. Proses pembangunan daerah memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel. Sehingga, kebijakan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu disesuaikan, hal ini juga berlaku pada kebijakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pembangunan Daerah yang baik didasarkan pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan perencanaan yang realistis, rasional dan akuntabel agar pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjaga sinergi antara perencanaan dan pembangunan daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengacu pada dokumen perencanaan pusat dan daerah. Salah satu tahap dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Kepala Daerah juga menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program-program prioritas Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Implementasinya, perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota harus sinkron dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Demikian pula RKPD harus dapat menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD. Pemerintah Daerah memiliki sistem perencanaan yang terdiri dari dokumen perencanaan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan di daerah mampu dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Dalam hal kewenangan daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bidang kewenangan yang menjadi urusan bersama yang meliputi 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Untuk urusan wajib tersebut terdiri dari 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Implementasi dari penyelenggaraan urusan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara itu, untuk

penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berkaitan dengan hal di atas agar penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut terarah, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020. Dokumen PPAS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 pada dasarnya merupakan dokumen penganggaran yang merupakan tindak lanjut dari dokumen KUA Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Penyusunan PPAS bersamaan dengan penyusunan KUA dan selanjutnya disampaikan sekaligus ke DPRD untuk dibahas dan disepakati. Dengan demikian, maka proses penyusunan PPAS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dilakukan secara simultan dengan penyusunan KUA Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

PPAS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 memuat skala prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PPAS juga memuat prioritas program untuk masing – masing urusan yang sinkron dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKPD. Selain itu, PPAS juga menguraikan pagu anggaran sementara masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara Perangkat Daerah dalam Dokumen PPAS tersebut setelah disepakati, maka akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RAPBD. Selanjutnya pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Peraturan Daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah:

1. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan.
2. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
3. Sebagai pedoman atau petunjuk adalah penyusunan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program/kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.
4. Sebagai dasar penilaian kinerja pelayanan daerah dalam satu tahun anggaran.

1.3 DASAR PENYUSUNAN

Adapun dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Kedudukan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Untuk penetapan rencana target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 ada perubahan terkait penetapan target DAK, hal ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Bahwa untuk penganggaran DAK ***setelah ditetapkan*** Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Dari ketentuan dimaksud, untuk target Dana Perimbangan dari DAK tidak dimasukkan pada KUA – PPAS Tahun Anggaran 2020 sehingga ada penurunan pada target dimaksud. Namun demikian akan dilakukan penyesuaian apabila Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 sudah ditetapkan.

Secara umum Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 turun sebesar 3,12% dari APBD Tahun 2019 dari sektor Dana Perimbangan (DAK) yang tidak dianggarkan dalam dokumen KUA – PPAS Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2020

Uraian	APBD TA 2019	RAPBD 2020	Bertambah/Berkurang	
			Rp	(%)
PENDAPATAN DAERAH	***4.226.488.930.000,00***	***4.094.767.188.177,00***	***(131.721.741.823,00)***	***(3,12)***
Pendapatan Asli Daerah	**1.603.002.870.000,00**	**1.785.526.779.717,00**	**182.523.909.717,00**	**11,39**
Hasil Pajak Daerah	992.946.880.000,00	1.077.525.000.000,00	84.578.120.000,00	8,52
Hasil Retribusi Daerah	60.634.325.282,00	73.946.284.225,00	13.311.958.943,00	21,95
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.269.955.596,00	36.686.467.300,00	1.416.511.704,00	4,02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	514.151.709.122,00	597.369.028.192,00	83.217.319.070,00	16,19
Dana Perimbangan	**1.767.882.511.000,00**	**1.438.141.340.460,00**	**(329.741.170.540,00)**	**(18,65)**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	144.644.504.000,00	182.306.267.460,00	37.661.763.460,00	26,04

Uraian	APBD TA 2019	RAPBD 2020	Bertambah/Berkurang	
			Rp	(%)
Dana Alokasi Umum	1.255.835.073.000,00	1.255.835.073.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus	367.402.934.000,00	-	(367.402.934.000,00)	(100)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**855.603.549.000,00**	**871.099.068.000,00**	**15.495.519.000,00**	**1,81**
Pendapatan Hibah	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	352.260.423.000,00	386.200.000.000,00	33.939.577.000,00	9,63
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	359.343.126.000,00	340.899.068.000,00	(18.444.058.000,00)	(5,13)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	***4.226.488.930.000,00***	***4.094.767.188.177,00***	***(131.721.741.823,00)***	***(3,12)***
Penerimaan pembiayaan	**612.900.000.000,00**	**761.800.000.000,00**	**148.900.000.000,00**	**24,29**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	600.000.000.000,00	754.000.000.000,00	154.000.000.000,00	25,67
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	12.900.000.000,00	7.800.000.000,00	(5.100.000.000,00)	(39,53)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAN	***612.900.000.000,00***	***761.800.000.000,00***	***148.900.000.000,00***	***24,29***

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 4.094.767.188.177,00 dengan komposisi target untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.785.526.779.717,00 atau 43,61% dari total Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 1.438.141.340.460,00 atau sebesar 35,12% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 871.099.068.000,00 atau sebesar 21,27% dari total Pendapatan Daerah.

Target PAD yang diperoleh dari Pajak Daerah ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.077.525.000.000,00 naik sebesar 8,52% atau dimana pada Tahun 2019 sebesar Rp. 992.946.880.000,00. Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar 21,95% pada Tahun 2020, dimana pada Tahun 2019 sebesar Rp 60.634.325.282,00 menjadi sebesar Rp 73.946.284.225,00. Sedangkan untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar Rp 36.686.467.300,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,02% dari tahun 2019.

Target Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 18,65% atau pada Tahun 2019 sebesar Rp 1.767.882.511.000,00 menjadi Rp 1.438.141.340.460,00 di tahun 2020. Penurunan dana perimbangan bersumber dari tidak ditargetkannya Dana Alokasi Khusus menunggu terbitnya Peraturan Presiden RI tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Pada Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2020 diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pada Pendapatan Hibah, diproyeksikan sebesar Rp. 144.000.000.000,00 pada Tahun 2020 atau tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019. Untuk pendapatan dari Dana Bagi hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya mengalami peningkatan 9,63% dari tahun 2019 menjadi Rp. 386.200.000.000,00. Sedangkan pada pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun 2020 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 5,13% atau pada Tahun 2019 sebesar Rp 359.343.126.000,00 menjadi Rp 340.899.068.000,00 pada Tahun 2020. Sehingga pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 871.099.068.000,00 atau naik sebesar 1,81% dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 761.800.000.000,00, yang berasal dari Penerimaan SiLPA sebesar Rp. 754.000.000.000,00 dan Penerimaan dari pengembalian dana bergulir sebesar Rp. 7.800.000.000,00.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Pembangunan daerah yang dituangkan dalam program-program prioritas daerah secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategi daerah berdasarkan pada urgensi kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dan penjelasan lebih detail dari program pembangunan yang tertuang pada Perencanaan Jangka Menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2021. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dan proyeksi pencapaian kinerja pemerintah sebelumnya. Prioritas pembangunan Tahun 2020 merupakan pedoman yang mengarahkan pola pembangunan berupa program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah agar fokus pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Sidoarjo.

Fokus prioritas pembangunan 2020 ditetapkan berdasarkan penjabaran dari masing-masing prioritas pembangunan. Dengan adanya fokus prioritas pembangunan 2020, diharapkan mampu mengarahkan semua Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan Tahun 2020 tetap memperhatikan sinergitas antara pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur hingga prioritas pembangunan nasional. Berikut ini adalah gambaran prioritas, fokus serta program pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada Tahun 2020 :

Prioritas 1 :

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.

Prioritas 2 :

Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan sinergis dengan potensi ekonomi daerah.
b) Pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan.
c) Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan.

Prioritas 3 :

Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
b) Pemberdayaan ekonomi lokal dan perluasan kesempatan kerja
c) Pengembangan produk unggulan daerah yang berdaya saing global
d) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang inovatif
e) Peningkatan upaya intensifikasi pertanian dan perikanan yang berbasis agrobisnis

Prioritas 4 :

***Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik*.** Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a) Peningkatan kualitas pelayanan publik
b) Pengembangan ketatalaksanaan paska restrukturisasi organisasi pemerintahan daerah
c) Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan SDM aparatur
d) Pengembangan *e-government* yang terintegrasi
e) Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan yang efektif

Prioritas 5 :

Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis. Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a) Peningkatan wawasan kebangsaan.
b) Peningkatan pendidikan politik masyarakat.
c) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.
e) Pengembangan kelestarian budaya lokal.
f) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
g) Penegakan supremasi hukum

Prioritas pembangunan kabupaten Sidoarjo dituangkan ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut (Tabel 3.1) :

Tabel 3.1.
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Tahun 2020
Kabupaten Sidoarjo

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	• Peningkatan Aksesbilitas dan kualitas pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 b. Persentase guru/tenaga pendidik yang berkualifikasi ahli	a. 97,87% b. 80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan	a. APM SD/MI b. APK SMP/MTs c. APK SD/MI d. APM SMP/MTs	a. 97,43% b. 92,89% c. 108,64% d. 79,71%	
			Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	a. APK PAUD b. Persentase PAUD yang telah terakreditasi c. Persentase Pendidikan Non Formal yang memenuhi standar	a. 92,89% b. 35% c. 30%	
			Program Pendidikan Sekolah Dasar	a. Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa b. Rata-Rata Nilai UN SD/MI c. APK SD/MI d. Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik e. APM SD/MI f. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	a. 1:28 b. 8,40 c. 108,64% d. 95,25% e. 97,43% f. 1:28	
			Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	a. Persentase bangunan ruang kelas SMP kategori baik b. APK SMP/MTs c. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP d. Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP e. APM SMP/MTs f. Rata-rata nilai UN SMP/MTs	a. 95,39% b. 99,45% c. 1:32 d. 1:32 e. 79,71% f. 6,95	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pengelolaan dan pelayanan pendidikan	97%	
			Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)	a. APM SD/MI b. APM SMP/MTs c. APK SMP/MTs d. APK SD/MI	a. 97,43% b. 79,71% c. 92,89% d. 108,64%	
			Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	a. Jumlah kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah b. Jumlah seni dan budaya daerah yang dibina menjadi destinasi wisata	a. 4 Kelompok b. 2 jenis	
		Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	a. AKB b. Persentase desa siaga aktif purnama mandiri c. Persentase Usia lanjut yang sehat d. Persentase balita stunting e. AKI	a. 6,6 b. 50 c. 53 d. 24,2 e. 71,2	Dinas Kesehatan
			Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	a. Persentase Puskesmas dengan akreditasi minimal dasar b. Persentase FKTL yang memenuhi akreditasi c. Persentase Penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional) d. Persentase keluarga yang disurvey KS e. Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	a. 100% b. 70% c. 16% d. 20% e. 90%	
			Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin b. Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar c. Persentase IRPT yang mendapatkan sertifikat (ijin edar) d. Persentase nakes yang memiliki ijin praktek	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	a. Angka keberhasilan pengobatan TB b. Persentase Penduduk 18 Th dengan Hipertensi c. Persentase Desa/Kel UCI d. Persentase orang terinfeksi HIV positif mendapatkan ARV	a. 93 b. 23 c. 90 d. 90	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	Puskesmas Terakreditasi	26	
			Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	a. Persentase pencapaian peserta KB Baru b. Persentase PPKBD yang aktif c. Persentase kelompok bina keluarga yang mandiri d. Persentase pencapaian peserta KB aktif	a. 85% b. 85,5% c. 73% d. 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
			Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	a. Prosentase Lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan b. Prosentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak c. Prosentase Lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak d. Prosentase Lembaga/Organisasi yang melaksanakan kebijakan Pemenuhan Hak Anak	a. 55,19% b. 100% c. 44,19% d. 19,31%	
			Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah	a. Bed Turn Over (BTO) b. Gross Death Rate (GDR) c. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu d. Persentase Indikator SPM Bidang penunjang Medis dan Non Medis yang mencapai target e. Persentase keluhan pelanggan (Number of Complain)	a. 40-50 kali b. 45% c. 100% d. 95% e. 0,02% f. 95% g. 95% h. 6-9 hari	Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				f. Persentase Indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target g. Persentase indikator SPM Bagian Keuangan yang mencapai target h. Average Length of Stay (ALOS) i. Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi j. Persentase indikator SPM Bagian Perencanaan dan Pemasaran yang mencapai target k. Persentase KSO baru dibidang non pelayanan kesehatan yang diselesaikan l. Persentase KSO baru dibidang pelayanan kesehatan yang diselesaikan m. Turn Over Interval (TOI) n. Persentase diterbitkan penelitian dalam jurnal ilmiah o. Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar p. Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi q. Persentase terlaksananya evaluasi Standar Asuhan keperawatan r. Persentase indikator SPM bagian SDM dan Diklit yang mencapai target s. Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan t. Net Death Rate (NDR) u. Bed Occupancy Rate (BOR) v. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang mencapai target	i. 85% j. 95% k. 27% l. 18% m. 1-3 hari n. 15% o. 100% p. 90% q. 100% r. 90% s. 100% t. 25% u. 60-85% v. 95%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	• Pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan sinergis dengan potensi ekonomi daerah	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan	a. Persentase panjang jalan dan jembatan yang dipelihara b. Persentase panjang jalan kabupaten yang dibangun c. Persentase panjang bagian-bagian jalan kabupaten yang dibangun d. Persentase pemanfaatan jalan dan jembatan yang berijin e. Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan f. Persentase panjang jalan penghubung pusat kegiatan baru	a. 9,00% b. 1,75% c. 0,27% d. 100% e. 1,87% f. 100%	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air
		•	Program Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengelolaan Data ke-PU-an	a. Persentase perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun b. Persentase perencanaan teknis itrigasi yang disusun c. Persentase perencanaan teknis pematusan dan pengendalian banjir yang disusun	a. 100% b. 100% c. 100%	
		•	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pematusan dan Pengendalian Banjir	a. Persentase pemenuhan sarpras pengendalian banjir b. Persentase jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara c. Persentase saluran pematusan yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara d. Persentase aset pengairan tertangani e. Persentase pembinaan dan penyuluhan di kecamatan	a. 65% b. 87% c. 25% d. 37,4% e. 90%	
		•	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi dengan baik (dalam RIK)	80%	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		•	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase penurunan pelanggaran kelayakan jalan	2,60%	
		•	Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem Informasi Dibidang Perhubungan	Persentase rekomendasi andalalin yang digunakan untuk kebijakan peningkatan layanan kapasitas jalan	100%	
		•	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum	80%	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga/organisasi masyarakat desa/kelurahan yang mempunyai peran aktif dalam pembangunan desa/kelurahan	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai ketentuan	95%	
			Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa	Persentase desa yang menyusun tatakelola keuangan aset dan kekayaan sesuai ketentuan	90%	
		• Pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	a. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dengan tepat b. Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang diselesaikan c. Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	a. 1,61% b. 100% c. 10,08%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		•	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang terlayani di TPA dan TPST	53%	
		•	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan	a. Luas RTH yang dikelola b. Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik	a. 42,05 Ha b. 82,00%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			lingkungan			
		•	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	a. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah b. Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan c. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 d. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	a. 1,54% b. 39% c. 5,38% d. 12,31%	
		• Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan	a. Persentase panjang jalan dan jembatan yang dipelihara b. Persentase panjang jalan kabupaten yang dibangun c. Persentase panjang bagian-bagian jalan kabupaten yang dibangun d. Persentase pemanfaatan jalan dan jembatan yang berijin e. Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan f. Persentase panjang jalan penghubung pusat kegiatan baru	a. 9,00% b. 1,75% c. 0,27% d. 100% e. 1,87% f. 100%	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air
		•	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pematusan dan Pengendalian Banjir	a. Persentase pemenuhan sarpras pengendalian banjir b. Persentase jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara c. Persentase saluran pematusan yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara d. Persentase aset pengairan tertangani	a. 65% b. 87% c. 25% d. 37,4% e. 90%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				e. Persentase pembinaan dan penyuluhan di kecamatan		
			Program Penataan Bangunan	Persentase bangunan gedung negara yang layak fungsi	43%	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
			Program Pengawasan Bangunan	Persentase bangunan yang ber-IMB	64,5%	
			Program Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, dan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	a. Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang b. Persentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah sesuai prosedur	a. 65% b. 100%	
			Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	a. Persentase pelayanan PALD sesuai target b. Persentase penanganan drainase sesuai dengan kajian c. Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target d. Persentase jalan lingkungan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik e. Persentase prasarana sanitasi yang disesuaikan sesuai target f. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh g. Persentase jumlah hunian RUSUNAWA yang dihuni	a. 9% b. 70% c. 5% d. 93% e. 93% f. 58,5% g. 97%	
			Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan	a. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tetap sasaran dan sesuai kebutuhan b. Persentase desa tangguh bencana di Kabupaten Sidoarjo	a. 100% b. 90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		•	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	a. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi b. Persentase korban bencana yang terehabilitasi	a. 60% b. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		•	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	a. Persentase wilayah kabupaten yang sudah mempunyai pos pmk b. Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi c. Cakupan wilayah kabupaten yang tertangani dalam waktu tanggap	a. 25% b. 65% c. 40%	
2	Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	• Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Program Penetapan Pajak Daerah.	Persentase jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sesuai ketentuan	83%	Badan Pelayanan Pajak Daerah
		•	Program Pengendalian Pajak Daerah	Persentase realisasi pembayaran tagihan pajak daerah	23%	
		•	Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.	Persentase pertumbuhan objek pajak daerah	4%	
		•	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional	30 orang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		•	Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan	Jumlah Standart Operasional Procedure (SOP) yang dimiliki	3 SOP	
		•	Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Keolahragaan	Jumlah prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional, dan Internasional	155 prestasi	
		• Pemberdayaan ekonomi lokal dan perluasan kesempatan kerja	Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	a. Persentase perusahaan yang menerapkan fasilitas kesejahteraan pekerja b. Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit c. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi penyelesaiannya melalui Perjanjian Bersama (PB)	a. 35% b. 22% c. 13%	Dinas Tenaga Kerja
		•	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi	a. Persentase pencari kerja yang telah difasilitasi penempatannya b. Persentase transmigran yang berhasil (bekerja	a. 67% b. 10% c. 7%	Dinas Tenaga Kerja

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				sendiri/membuka lapangan usaha atau ke orang lain) c. Persentase peserta bimtek TKMT & kewirausahaan yang telah membuka usaha		
		•	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan / kompetensi b. Persentase lembaga pelatihan tenaga kerja yang terakreditasi	a. 81% b. 19%	
		•	Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	a. Persentase Koperasi sehat b. Persentase pertumbuhan usaha mikro c. Persentase SDM/Pengelola Koperasi bersertifikat SKKNI	a. 40,22% b. 4,62% c. 23,60%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		•	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	a. Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi b. Persentase Usaha mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha mikro	a. 14,18% b. 48,01%	
		•	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	92,18%	
			Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	a. Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang : UPPKS Berkembang b. Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang : UED-SP Berkembang c. Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang : P 3 EL Berkembang d. Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang : BUMDES Berkembangan	a. 42% b. 46% c. 41% d. 15,5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		• Pengembangan produk unggulan daerah yang berdaya saing global	Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat	SKM terhadap layanan pasar	76,9%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		•	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal	a. Nilai ekspor non migas b. Nilai net ekspor perdagangan dalam negeri	a. 2,75 Triliun b. 1859	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		•	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	a. Persentase pertumbuhan usaha industri b. Persentase IKM yang terstandarisasi	a. 0,81% b. 4,35%	
		• Peningkatan pemanfaatan teknologi tempat guna yang inovatif	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	a. Nilai realisasi investasi PMA b. Persentase permasalahan penanaman modal yang diselesaikan c. Nilai realisasi investasi PMDN	a. 676.428 Milyar b. 200 permasalahan c. 17.328 Triliun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		•	Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	a. Jumlah investor baru b. Persentase peningkatan kepeminatan untuk kerjasama	a. 162 investor b. 2%	
		•	Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	a. Persentase kontribusi retribusi pelayanan perizinan tertentu terhadap PAD b. Persentase pelayanan perizinan tertentu yang tepat waktu sesuai SOP c. Persentase perizinan yang terbit	a. 100% b. 100% c. 100%	
		• Peningkatan upaya intensifikasi pertanian dan perikanan yang	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	a. Tingkat konsumsi beras b. Indikator Fluktuasi harga (constant of variant) c. Persentase Peningkatan cadangan pangan	a. 240 gram/kapita/hari	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		berbasis agrobisnis		d. Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	b. 11 c. 0,23% d. 83,7%	
			Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	a. Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura b. Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	a. 1,63% b. 1,63%	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan	a. Persentase peningkatan kecukupan pemanfaatan sarana prasarana pertanian dan perkebunan b. Persentase kelompok tani yang naik kelas	a. 2,4% b. 2,3%	
			Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan	a. Persentase peningkatan produktivitas peternakan b. Persentase peningkatan populasi ternak	a. 1% b. 1%	
			Program Peningkatan Kualitas Produksi peternakan	a. Persentase penurunan angka kejadian penyakit hewan b. Persentase produk pangan dan non pangan asal hewan yang asuh	a. 4% b. 50%	
			Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,4%	Dinas Perikanan
		•	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam	a. Jumlah produksi garam b. Jumlah produksi perikanan tangkap, perairan umum dan daratan c. Jumlah produksi perikanan laut	a. 10.073.206 kg b. 550.000 kg c. 15.600.000 kg	
		•	Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	a. Jumlah produksi olahan hasil perikanan b. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mempunyai sertifikat jaminan mutu	a. 12.076.090 kg b. 1 SKP	
4	Meningkatkan kualitas pelayanan	• Peningkatan kualitas pelayanan publik	Program pelayanan pencatatan sipil	a. Persentase pelayanan pencatatan sipil yang tepat waktu b. Persentase layanan kepemilikan akta kelahiran	a. 100% b. 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik			yang sesuai dengan ketentuan		Sipil
		•	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	a. Persentase pelayanan pindah datang/keluar yang tepat waktu b. Persentase desa/kelurahan yang rentan pendataan administrasi kependudukan c. Persentase kepemilikan KTP-EL yang sesuai ketentuan d. Persentase kepemilikan KK yang sesuai ketentuan	a. 100% b. 30% c. 100% d. 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		•	Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	a. Persentase rekomendasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditindaklanjuti b. Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah c. Persentase penduduk terjaring operasi yustisi yang ditindaklanjuti	a. 6 kebijakan' b. 80% c. 100%	
		•	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Persentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu b. Persentase Sarpras SIAK yang layak fungsi	a. 100% b. 100%	
		•	Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan	a. Jumlah pengunjung perpustakaan b. Jumlah koleksi perpustakaan	a. 160.000 orang b. 100.000 eks	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		•	Program Pengelolaan, Pelayanan dan Dokumentasi Kearsipan	a. Persentase pelayanan kearsipan yang terpenuhi (jumlah pelayanan arsip yang dapat dipenuhi dibagi jumlah permintaan layanan data/arsip) b. Jumlah lembaga yang telah menyelenggarakan sistem kearsipan dengan standar yang ditentukan	a. 25% b. 104 lembaga	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		•	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sidoarjo	951 perpustakaan	
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Balongbendo
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. 90% b. 100% c. 100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Buduran
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan b. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	a. 100% b. 100% c. 100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Candi

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	a. 95% b. 95% c. 90%	
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Gedangan
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, pembangunan, perekonomian, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data IDM secara valid c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan	a. 100% b. 100% c. 100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	94%	Kecamatan Jabon
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase desa yang menyusun dokumen sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan	a. 90% b. 100% c. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				pelaporan c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan		
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	84%	Kecamatan Krembung
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. 100% b. 100% c. 100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	100%	Kecamatan Krian
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen:	a. 94,74% b. 100% c. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				perencanaan, penganggaran dan pelaporan		
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Porong
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	a. 100% b. 100% c. 100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	100%	
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan	a. 85% b. 85% c. 85%	Kecamatan Prambon
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Sedati

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	a. 93,75% b. 100% c. 100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Sidoarjo
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan b. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	a. 100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Sukodono
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan	a. 100% b. 100% c. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan		
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Taman
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	a. 90% b. 100% c. 100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	86%	Kecamatan Tanggulangin
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan b. Persentase desa yang menyusun sesuai	a. 97,75% b. 100% c. 89,47%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid		
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Tarik
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. 100% b. 100% c. 100%	
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Tulangan
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	a. 100% b. 100% c. 24%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan c. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan	a. 85% b. 100% c. 85%	Kecamatan Waru
		•	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	Kecamatan Wonoayu
		•	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid c. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. 100% b. 0,83% c. 100%	
		•	Program Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	a. Persentase kontribusi retribusi pelayanan perizinan tertentu terhadap PAD b. Persentase perizinan yang terbit c. Persentase pelayanan perizinan tertentu yang tepat waktu sesuai SOP	a. 100% b. 100% c. 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		• Pengembangan ketatalaksanaan pasca restrukturisasi organisasi pemerintahan daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	a. Persentase perangkat daerah yang nilai SAKIP minimal B b. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi c. Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti d. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat yang ditindaklanjuti e. Persentase perangkat daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara f. Persentase desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara g. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	a. 1 Laporan b. Terdefinisi c. 100% d. 75% e. 4,08% f. 0,93% g. 96%	Inspektorat
		•	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	a. Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Ukuran Kinerja telah sesuai dengan dok Perencanaan Diatasnya b. Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System c. Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target d. Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	a. 100% b. 100% c. 87% d. 100%	Sekretariat Daerah
		•	Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	a. Persentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti b. Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang SKMnya berkategori baik	a. 100% b. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		•	Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan, keprotokolan, dan Rumah Tangga	84%	
		•	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang diterapkan	100%	
		•	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	100%	
		•	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan Organisasi PBJ	Level 4	
		•	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	a. Persentase doktasi informasi hukum yang dipublikasikan b. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk c. Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	a. 100% b. 100% c. 100%	
			Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal & BUMD	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan dengan baik	100%	
		• Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan SDM Aparatur	Program Pengembangan ASN	Persentase PNS dalam talent pool	60%	Badan Kepegawaian Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan	100%	
			Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	Persentase perangkat daerah yang telah tertib administrasi kepegawaian	80%	
			Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	18%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		• Pengembangan e-Government yang terintegrasi	Program pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	83 indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika	Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi dengan data center	80%	
			Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase jaringan FO yang dibangun	81,4%	
			Program pengembangan data informasi statistik daerah	Persentase data statistik yang diolah dan dianalisa	80%	
		• Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan yang efektif	Program perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah b. Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD c. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. 90% b. 70% c. 95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah	a. Persentase ketersediaan elemen data yang aktual dan valid sebagai masukan perencanaan pembangunan daerah b. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti	a. 90% b. 100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	a. Persentase capaian kinerja program PD bidang Penmas terhadap perencanaan dengan capaian 76 % b. Persentase Hasil Rapat Koordinasi bidang Penmas yang ditindaklanjuti c. Persentase dokumen perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang berkualitas baik	a. 90% b. 90% c. 90%	
			Program Perencanaan Bidang Ekonomi	a. Persentase capaian kinerja program PD bidang ekonomi terhadap perencanaan dengan capaian 76 % b. Persentase Hasil Rapat Koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti c. Persentase dokumen perencanaan PD Bidang ekonomi berkualitas baik	a. 95% b. 90% c. 100%	
			Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah	a. Persentase dokumen perencanaan RKPD yang sesuai dengan arahan dalam dokumen tata ruang b. Persentase Hasil Rapat Koordinasi bidang PD Bidang pengembangan wilayah, permukiman dan prasarana wilayah yang ditindaklanjuti c. Persentase capaian kinerja program PD Bidang pengembangan wilayah, permukiman dan prasarana wilayah terhadap perencanaan dengan capaian 76 % d. Persentase dokumen perencanaan Renja PD Bidang pengembangan wilayah, permukiman dan prasarana wilayah berkualitas baik	a. 70% b. 85% c. 95% d. 90%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	a. Persentase Penyelenggaraan kegiatan dialog dan jaring aspirasi masyarakat b. Persentase penyelenggaraan kegiatan BK, Komisi, dan Monev c. Persentase penyelenggaraan kegiatan Banggar, KUA, KUPA, APBD dan PAPBD	a. 84% b. 84% c. 84%	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Persidangan dan Perundang-undangan	a. Persentase Perda dan produk hukum lainnya yang dibahas, disusun dan ditetapkan oleh DPRD b. Persentase persidangan dan rapat - rapat DPRD yang difasilitasi	a. 84% b. 84%	
			Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	a. Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas DPRD b. Meningkatnya kesehatan anggota DPRD	a. 84% b. 50 orang	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Ketetapan waktu dalam penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD) b. Ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan PAPBD) c. Persentase OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan d. Persentase dokumen penganggaran yang telah dipublikasikan melalui media publik e. Persentase OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis SAP (Akrual) f. Persentase OPD yang tepat dalam menentukan kode rekening RKA OPD	a. Tepat waktu b. Tepat waktu c. 95,7% d. 100% e. 100% f. 100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	a. Persentase OPD yang tepat dalam menentukan kode rekening RKA OPD b. Ketepatan waktu dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan c. Persentase dokumen penganggaran yang telah dipublikasikan melalui media publik d. Ketetapan waktu dalam penyusunan APBD dan PAPBD	a. 100% b. Tepat waktu c. 100% d. Tepat waktu	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	a. Persentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum b. Persentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD c. Persentase aset tetap (tanah) yang telah di inventarisasi dalam laporan BMD	a. 100% b. 100% c. 30,94%	
5	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis	• Peningkatan wawasan kebangsaan	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	a. Kategori kabupaten peduli HAM b. Jumlah kader wawasan kebangsaan	a. 90% b. 100 orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		• Peningkatan pendidikan politik masyarakat	Program Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	90%	
		• Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat • Peningkatan kerukunan antar umat beragama	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	a. Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah tepat waktu b. Persentase konflik yang berhasil di tangani tepat waktu	a. 90% b. 90%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		•	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase satlinmas yang aktif dalam pengendalian lingkungan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		•	Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	a. Cakupan Wilayah Pengamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ketertiban dan ketentraman c. Cakupan Wilayah Patroli	a. 18 kecamatan b. Baik c. 18 kecamatan	
		•	Program pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	
		•	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	a. Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani b. Persentase Penyandang Disabilitas yang terlayani c. Persentase PMKS yang terlayani d. Persentase Tuna Sosial yang terlayani	a. 47,09% b. 3,48% c. 100% d. 17,92%	Dinas Sosial
		•	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	a. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial b. Persentase fakir miskin yang telah terpenuhi fungsi sosialnya	a. 66,70% b. 60%	
		•	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Persentase Korban Bencana Sosial yang tertangani b. Persentase Korban Bencana Alam yang tertangani c. Prosentase penduduk miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	a. 80% b. 90% c. 80%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		• Pengembangan kelestarian budaya lokal	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	a. Jumlah kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah b. Jumlah seni dan budaya daerah yang dibina menjadi destinasi wisata	a. 4 kelompok b. 2 jenis	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		•	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	30 orang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
		•	Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan	jumlah Standar Operasional Procedure (SOP) yang dimiliki	3 SOP	
		•	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan	Jumlah prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	155 prestasi	
		• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Persentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak b. Persentase kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang tertangani c. Persentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan PUG dan pemberdayaan perempuan d. Persentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak	a. 19,31% b. 100% c. 55,19% d. 44,19%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
		• Penegakan supremasi hukum	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan Perangkat Daerah seperti yang ada dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kode	Urusan Pemerintahan	Belanja Langsung
1	**URUSAN WAJIB**	**2.429.115.779.595,00**
101	***URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR***	***2.110.699.602.570,00***
10101	*PENDIDIKAN*	*382.903.794.570,00*
1010101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	382.903.794.570,00
10102	*KESEHATAN*	*688.190.713.000,00*
1010201	Dinas Kesehatan	203.190.713.000,00
1010202	Rumah Sakit Umum Daerah	485.000.000.000,00
10103	*PEKERJAAN UMUM*	*928.545.449.380,00*
1010302	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	602.939.845.000,00
1010402	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang	325.605.604.380,00
10104	*PERUMAHAN RAKYAT*	*92.862.740.620,00*
1010402	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang	92.862.740.620,00
10105	*KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT*	*9.506.576.000,00*
1010501	Satuan Polisi Pamong Praja	9.506.576.000,00
10106	*SOSIAL*	*8.690.329.000,00*
1010601	Dinas Sosial	8.690.329.000,00
102	***URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR***	***318.416.177.025,00***
10201	*TENAGA KERJA*	*6.239.509.000,00*
1020101	Dinas Tenaga Kerja	6.239.509.000,00
10202	*PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*	*2.247.835.486,00*
1020202	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	2.247.835.486,00
10203	*PANGAN*	*9.322.040.955,00*
1020301	Dinas Pangan dan Pertanian	9.322.040.955,00
10205	*LINGKUNGAN HIDUP*	*178.389.786.800,00*
1020501	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	178.389.786.800,00
10206	*ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*	*3.435.852.000,00*
1020601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.435.852.000,00
10207	*PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA*	*15.366.205.000,00*

Kode	Urusan Pemerintahan	Belanja Langsung
1020701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.366.205.000,00
10208	*PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*	*12.361.102.514,00*
1020202	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	12.361.102.514,00
10209	*PERHUBUNGAN*	*33.902.318.000,00*
1020901	Dinas Perhubungan	33.902.318.000,00
10210	*KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA*	*20.872.031.830,00*
1021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.872.031.830,00
10211	*KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH*	*9.981.069.000,00*
1021101	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	9.981.069.000,00
10212	*PENANAMAN MODAL*	*6.552.299.000,00*
1021201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.552.299.000,00
10213	*KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA*	*11.122.899.840,00*
1021301	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	11.122.899.840,00
10214	*STATISTIK*	*684.443.170,00*
1021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	684.443.170,00
10216	*KEBUDAYAAN*	*1.300.879.430,00*
1010101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.300.879.430,00
10217	*PERPUSTAKAAN*	*5.579.198.919,00*
1021701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.579.198.919,00
10218	*KEARSIPAN*	*1.058.706.081,00*
1021701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.058.706.081,00
2	**URUSAN PILIHAN**	**55.561.148.205,00**
201	***Urusan Pilihan***	***55.561.148.205,00***
20101	*KELAUTAN DAN PERIKANAN*	*23.283.640.000,00*
2010101	Dinas Perikanan	23.283.640.000,00
20102	*PARIWISATA*	*1.991.441.160,00*
1021301	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.991.441.160,00
20103	*PERTANIAN*	*9.452.619.045,00*
1020301	Dinas Pangan dan Pertanian	9.452.619.045,00
20106	*PERDAGANGAN*	*18.403.971.220,00*
2010601	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.403.971.220,00
20107	*PERINDUSTRIAN*	*2.429.476.780,00*
2010601	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.429.476.780,00
3	**PENUNJANG URUSAN**	**65.341.296.526,00**
301	***Penunjang Urusan***	***65.341.296.526,00***
30101	*INSPEKTORAT*	*6.738.542.000,00*
3010101	Inspektorat	6.738.542.000,00
30102	*PERENCANAAN*	*11.430.075.526,00*
3010201	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.430.075.526,00
30103	*KEUANGAN*	*20.486.928.000,00*
3010301	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.528.604.000,00
3010302	Badan Pelayanan Pajak Daerah	9.958.324.000,00
3010303	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan	Belanja Langsung
30104	*KEPEGAWAIAN*	*10.970.787.740,00*
3010401	Badan Kepegawaian Daerah	10.970.787.740,00
30105	*PENDIDIKAN DAN PELATIHAN*	*5.278.866.260,00*
3010401	Badan Kepegawaian Daerah	5.278.866.260,00
30107	*PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*	*10.436.097.000,00*
3010701	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.436.097.000,00
4	**PENDUKUNG**	**106.035.479.000,00**
401	***Pendukung***	***106.035.479.000,00***
40101	*SEKRETARIAT DAERAH*	*46.569.775.000,00*
4010101	Sekretariat Daerah	46.569.775.000,00
4010102	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00
40102	*SEKRETARIAT DPRD*	*59.465.704.000,00*
4010201	Sekretariat DPRD	59.465.704.000,00
4010202	DPRD	0,00
5	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**6.425.032.000,00**
501	***URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***	***6.425.032.000,00***
50101	*KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*	*6.425.032.000,00*
5010101	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.425.032.000,00
6	**KEWILAYAHAN**	**77.151.027.200,00**
601	***KEWILAYAHAN***	***77.151.027.200,00***
60101	*KECAMATAN*	*77.151.027.200,00*
6010101	Kecamatan Sidoarjo	18.506.710.800,00
6010102	Kecamatan Candi	1.800.589.000,00
6010103	Kecamatan Buduran	1.963.781.800,00
6010104	Kecamatan Wonoayu	1.729.172.000,00
6010105	Kecamatan Krian	7.907.771.800,00
6010106	Kecamatan Porong	8.248.685.000,00
6010107	Kecamatan Krembung	1.991.243.000,00
6010108	Kecamatan Jabon	2.542.581.000,00
6010109	Kecamatan Balongbendo	2.152.000.000,00
6010110	Kecamatan Tarik	2.005.790.000,00
6010111	Kecamatan Taman	11.592.162.600,00
6010112	Kecamatan Waru	2.951.265.000,00
6010113	Kecamatan Gedangan	2.383.095.000,00
6010114	Kecamatan Sedati	2.621.494.200,00
6010115	Kecamatan Tanggulangin	2.166.154.600,00
6010116	Kecamatan Tulangan	1.880.237.400,00
6010117	Kecamatan Prambon	1.957.589.000,00
6010118	Kecamatan Sukodono	2.750.705.000,00
	TOTAL	**2.739.629.762.526,00**

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, komposisi belanja langsung berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut;

1. Urusan wajib mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp. 2.429.115.779.595,00
2. Urusan pilihan mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp. 55.561.148.205,00
3. Penunjang urusan pemerintahan mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp. 65.341.296.526,00
4. Urusan Pendukung mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp. 106.035.479.000,00
5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp. 6.425.032.000,00 dan
6. Urusan Kewilayahan mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp. 77.151.027.200,00

Plafon anggaran pada urusan wajib berada pada Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp. 928.545.449.380,00 yang berorientasi pada penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar dan publik, untuk penanggulangan banjir, pembangunan jalan cor, frontage road, dan pembangunan gedung pemerintahan terpadu. Kemudian Urusan Kesehatan sebesar Rp. 688.190.713.000,00 yang berorientasi pada pelayanan dasar kesehatan masyarakat serta diikuti urusan pendidikan sebesar Rp. 382.903.794.570,00.

Plafon anggaran untuk urusan pilihan masih didominasi oleh urusan urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp. 23.283.640.000,00 urusan perdagangan sebesar Rp. 18.403.971.220,00, urusan pertanian sebesar Rp. *9.452.619.045,00,* urusan Perindustrian sebesar Rp. 2.429.476.780,00, dan urusan pariwisata sebesar Rp. 1.991.441.160,00. Besarnya anggaran pada urusan pemerintahan pilihan tersebut sesuai dengan potensi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki potensi bidang kelautan dan perikanan, perdagangan, pertanian, perindustrian serta pariwisata yang diharapkan mampu menjadi potensi ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang potensial. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang nantinya dalam jangka panjang akan meningkatkan PAD.

Pada penunjang urusan pemerintahan, anggaran terbesar pada Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan sebesar Rp. 20.486.928.000,00 yang berorientasi pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan tata kelola keuangan daerah, dan peningkatan tata kelola aset daerah. Pada urusan pendukung, anggaran terbesar pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 59.465.704.000,00. Pada urusan kesatuan bangsa dan politik sebesar Rp.

6.425.032.000,00. Sedangkan pada urusan kewilayahan sebesar Rp. 77.151.027.200,00.

Dari keseluruhan distribusi plafon anggaran sementara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya perhatian utama terhadap pembangunan daerah pada Tahun 2020 yang dititik beratkan pada penyediaan infrastruktur umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang lebih terjangkau dan berkualitas. Peningkatan infrastruktur, untuk Tahun 2020 berada pada posisi pertama, hal tersebut mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap dianggap sebagai faktor pendukung pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai keberhasilan di bidang ekonomi, pemerataan pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 dalam tiap Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan dijelaskan pada lampiran yang berupa tabulasi yang memuat uraian program, kegiatan, dan plafon anggarannya untuk masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tabel berikut ini:

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dalam tiap Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan dijelaskan pada lampiran yang berupa tabulasi yang memuat uraian program, kegiatan, dan plafon anggarannya untuk masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

(Terlampir)

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2020 dijabarkan dalam tabel 4.3 berikut

Tabel 4.3.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	APBD 2019	RAPBD 2020	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
BELANJA DAERAH	***4.826.488.930.000,00***	***4.848.767.188.177,00***	***22.278.258.177,00***	***0,46***
Belanja Tidak Langsung	**2.390.717.308.099,65**	**2.109.137.425.651,00**	**(281.579.882.448,66)**	**(11,78)**
Belanja Pegawai	1.492.157.103.618,10	1.239.335.373.671,00	(252.821.729.947,11)	(16,94)
Belanja Hibah	210.601.062.000,00	205.911.040.000,00	(4.690.022.000,00)	(2,23)
Belanja Bantuan Sosial	73.097.083.100,35	73.432.005.000,00	334.921.899,65	0,46
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	105.358.120.528,20	115.147.128.422,00	9.789.007.893,80	9,29
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa	499.293.533.651,00	470.311.878.558,00	(28.981.655.093,00)	(5,80)
Belanja Tidak Terduga	10.210.405.202,00	5.000.000.000,00	(5.210.405.202,00)	(51,03)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung masih didominasi oleh Belanja Pegawai dan mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 sebesar 16,94% menjadi Rp. 1.239.335.373.671,00 atau 25,56% dari total anggaran belanja daerah Tahun 2020. Anggaran ini diperuntukkan sebagai anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS Daerah dan Pejabat Daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, dan para Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, komponen lainnya seperti Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2020 mengalami peningkatan secara berturut-turut sebesar 0,46%, dan 9,29%, sedangkan anggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar 2,23%, 5,80% dan 51,03%.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pembiayaan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 mengarahkan penerimaan pembiayaan pada Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu dan Penerimaan Pengembalian Dana bergulir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang. Dari uraian tersebut, maka penerimaan Pembiayaan Daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	APBD 2019	RAPBD 2020	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
PEMBIAYAAN DAERAH	***600.000.000.000,00***	***754.000.000.000,00***	***154.000.000.000,00***	***25,67***
Penerimaan Pembiayaan	**612.900.0000.000,00**	**761.800.000.000,00**	**148.900.000.000,00**	**24,29**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	600.00.000.000,00	754.000.000.000,00	154.000.000.000,00	25,67
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	12.900.000.000,00	7.800.000.000,00	(5.100.000.000,00)	(39,53)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	***612.900.000.000,00***	***761.800.000.000,00***	***148.900.000.000,00***	***24,29***
Pengeluaran Pembiayaan	**12.900.000.000,00**	**7.800.000.000,00**	**(5.100.000.000,00)**	**(39,53)**
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	12.900.000.000,00	7.800.000.000,00	(5.100.000.000,00)	(39,53)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	***12.900.000.000,00***	***7.800.000.000,00***	***(5.100.000.000,00)***	***(39,53)***
Pembiayaan Neto	***600.000.000.000,00***	***754.000.000.000,00***	***154.000.000.000,00***	***25,67***

BAB VI

PENUTUP

Persetujuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 antara Bupati Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020

Sidoarjo, Agustus 2019

BUPATI SIDOARJO

H. SAIFUL ILAH, SH., MHum